

## ABSTRAK

### **Hamdi Ramadhan : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Raya Padang Menurut Perspektif Fiqh Siyasah**

Adapun penulisan skripsi ini berlatar belakang dari tidak terealisasinya Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Keberadaan pedagang kaki lima ini menimbulkan berbagai problema dikawasan Pasar Raya Padang, antara lain ketidaknyamanan yang dialami para pemakai jalan kerana banyak trotoar dikuasai oleh pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima menimbulkan berbagai persoalan, terkait dengan masalah ketertiban, keramaian, dan kebersihan untuk kemaslahatan bersama. Tindakan penertiban merupakan salah satu sumber terjadinya konflik antara pedagang kaki lima dengan aparat pemerintah. Dalam menghadapi berbagai tekanan yang dilakukukakan pemerintah yang dirasa sangat membatasi ruang geraknya. Keberadaan inilah yang membuat pemerintah Kota Padang untuk melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap para pedagang kaki lima di Kota Padang khususnya di Pasar Raya Padang berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 dengan tujuan untuk menciptakan suasana tempat usaha PKL yang tertib, bersih, indah, nyaman, dan aman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan, yakni Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Padang. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pasar Raya padang. Adapun metode pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang secara langsung berinteraksi sebagai data primer dari pihak pemerintah kota dan pedagang kaki lima. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif analitik.

Hasil Penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan dengan responden diperoleh jawaban – jawaban bahwa prosedur – prosedur yang terdapat di dalam Perda No. 3 Tahun 2014 tersebut mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima belum terlaksana sepenuhnya oleh Pemerintah Kota. Setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis juga meninjau pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash – nash Al – Qur’an, Hadits, dan kaidah fiqhiyah untuk melihat prosedur pelaksanaan Perda

No. 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum sepenuhnya terlaksana oleh Pemerintah adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan tinjauan Fiqh Siyash.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

